

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENANGANAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILU LEGISLATIF DI PROVINSI GORONTALO
TESIS

Disusun dan Diajukan oleh :

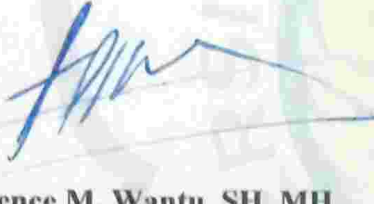
YUSUF HAMZAH
NIM : 710 519 003

Disetujui dan Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
NIP. NIP. 19740119 200112 1 001


Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag.,MH
NIP. 19760208 200312 2 002

Gorontalo, November 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

**PENANGANAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILU LEGISLATIF DI PROVINSI GORONTALO**

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh :

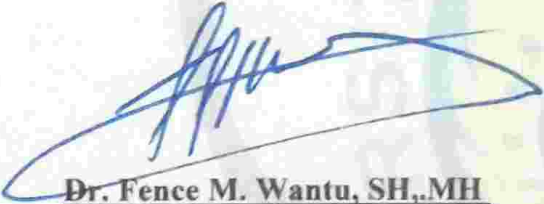
YUSUF HAMZAH
NIM : 710 519 003

Disetujui dan Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

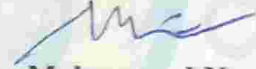
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
NIP. NIP. 19740119 200112 1 001



Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag.,MH
NIP. 19760208 200312 2 002

Gorontalo, November 2021

Mengetahui

**Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo**



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 19591227 198603 2 003

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**



Dr. Dian Rkawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

PENANGANAN PELANGGARAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI PROVINSI GORONTALO

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh :

YUSUF HAMZAH
NIM : 710 519 003



Telah Disetujui dan Disahkan oleh
Panitia Tesis pada Tanggal November 2021


KOMISI PENGUJI:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
<u>Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH</u> NIP. 19741223 200312 2 011	Ketua Program Studi/ Ketua	
<u>Dr. Fence M. Wantu, SH., MH</u> NIP. 19740119 200112 1 001	Pembimbing I	
<u>Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH</u> NIP. 19760208 200312 2 002	Pembimbing II	
<u>Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum</u> NIP. 19680409 199303 2 001	Penguji I	
<u>Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH</u> NIP. 19741223 200312 2 011	Penguji II	

Gorontalo, November 2021

Mengetahui


Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo

Prof. Dr. Asna Afeta, M.Si
NIP. 19591227 198603 2 003

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

ABSTRAK

YUSUF HAMZAH.. NIM. 710519003. Penanganan Pelanggaran Praktik Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Di Provinsi Gorontalo. Tesis. Pembimbing I Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Pembimbing II Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH. Program Studi Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang pada pemilihan umum oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran politik uang pada pemilu legislatif di Provinsi Gorontalo. dan untuk mengetahui konsep penanganan yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada pemilihan umum.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pihak Koordinator Gakummdu dari Kepolisian dan Koordinator Gakummdu dari Kejaksaan. Data hasil penelitian dikumpulkan dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bentuk penanganan yang dilakukan Bawaslu yaitu melalui 2 (dua) hal yakni pencegahan yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, pemerintah terkait pencegahan dini terhadap pelanggaran politik uang. dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta penindakan terhadap dugaan tindak pidana politik uang pada pemilihan legislatif yang meliputi seluruh wilayah Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kendala-kendala penanganan dugaan pelanggaran politik uang yaitu: faktor Perundang-undangan; faktor sumber daya manusia; faktor budaya; faktor penegak hukum; faktor kurangnya pendidikan politik masyarakat; faktor terbatasnya waktu penanganan pelanggaran; dan faktor tidak terpenuhinya syarat dugaan tindak pidana politik uang. Konsep penanganan pelanggaran yang ideal dalam melakukan penanganan pelanggaran yaitu: Merevisi pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dengan merubah redaksi kalimat dari Pelaksana, Peserta Atau Tim Kampanye menjadi Setiap Orang; ketentuan calon anggota Bawaslu yang tidak hanya berpengalaman dalam pemilu tetapi juga memiliki kompetensi dibidang hukum; dilaksanakannya pendidikan politik kepada masyarakat yang melibatkan Partai Politik, Bawaslu, KPU, Kejaksaan, dan Polri; dan menambah waktu penanganan pelanggaran praktek politik uang oleh Bawaslu

Kata Kunci: Penanganan, Tindak Pidana, Politik Uang

ABSTRACT

YUSUF HAMZAH. STUDENT ID NUMBER. 710519003. The Handling of Money Politics Violation in Legislative Elections in Gorontalo Province. Thesis. The Principal Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. The Co-supervisor is Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH. Study Program of Law. Postgraduate Program, State University of Gorontalo.

The study aims: to analyse the handling of money politic violations in general elections by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Gorontalo Province, to determine and analyse the obstacles encountered in handling money politics in legislative elections in Gorontalo Province, as well as to the ideal handling concept of money politics violations in general elections.

This study is sociological and empirical research with a qualitative research approach. The data sources in this study are the members of Bawaslu of Gorontalo Province, Gakkumdu (Integrated Law Enforcement Center) Coordinator from Police, and Gakkumdu Coordinator from Prosecutor's Office. In addition, the research data are collected through observation, interviews, and documentation, while the data analysis technique employs qualitative data analysis.

The findings disclose that there are two forms of handling carried out by BAWASLU, namely prevention which includes socialization to the community, political parties, and government about early prevention of money politics violations and coordination with related parties. Another form of handling is prosecution on alleged criminal acts of money politics in the legislative elections covering the entire area of the Bawaslu of Gorontalo Province. Otherwise, the obstacles in handling alleged violations of money politics are legislative factors; human resource factors; cultural factors; law enforcement factors; the factors of lack of public political education; the factors of limited time for handling violations; and factors of the unfulfillment of requirements for the alleged criminal act of money politics. Meanwhile, the ideal concept of handling money politics violation is to revise article 280 paragraph (1) of Act Number 7 of 2017 concerning Elections by changing the editorial of the sentence from "Implementers, Participants or Campaign Teams" to "Everyone"; provisions for candidates of Bawaslu members are not only experienced in elections but also have legal competence; the implementation of political education to the public involving Political Parties, Bawaslu, KPU (General Elections Commission), Prosecutor's Office, and Polri (Indonesian National Police) and extend the time for handling money politics crimes by Bawaslu.

Keywords: Handling, Crime, Money Politics

